Kelola
Jurnal Manajemen Pendidikan
Magister Manajemen Pendidikan
FKIP Universitas Kristen Satya Wacana
jurnalkelola@gmail.com

e-ISSN 2549-9661
Volume: 10, No. 1, Januari-Juni 2023
Halaman: 1-252

Pemberdayaan Guru Bahasa Bali Jenjang SMA/SMK dalam Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali

I Wayan Gede Wisnu
Universitas Pendidikan Ganesha
gede.wisnu@undiksha.ac.id

Ida Ayu Putu Purnami
Universitas Pendidikan Ganesha
putu.purnami@undiksha.ac.id

Ni Putu Diana Sari
SMP Negeri 11 Denpasar
nisari23@guru.smp.belajar.id

ABSTRACT

This study describes the policies of the Provincial Government of Bali regarding the empowerment of Balinese language teachers. This departs from the district or city government's policy on empowering Balinese language teachers by appointing local government contract teachers who only reach the elementary and secondary education levels, as explored through previous research in Denpasar. Meanwhile, the SMA/SMK education level is under the authority of the Provincial Government (Bali), which will become the locus and focus of this research as follow-up research. Concerning this background, this research aims to describe (1) the implementation and (2) the policy implications of the Provincial Government of Bali in empowering Balinese language teachers. This research is designed as policy research using qualitative descriptive construction. In this case, the research data is conceived as an ideological substance and structure as an empirical actualization of Denpasar City Government policies obtained through documentation studies, interviews, and questionnaires. Research data analysis was carried out through reduction, classification, and interpretation. The results of this study indicate that (1) the implementation of the Bali Provincial Government's policy regarding the empowerment of Balinese language teachers in the form of delegation, arrangement, and mapping of Balinese language teachers Meanwhile, (2) the implications of the Bali Provincial Government policy regarding the empowerment of Balinese language teachers are in the form of balancing, strengthening, and developing Balinese language teachers.

Keywords*: Policy, Balinese Teacher, Bali Province*

Article Info

Received date: 30 November 2022 Revised date: 1 Juni 2023 Accepted date: 27 Juni 2023

PENDAHULUAN

Perhatian pemerintah terhadap keberadaan dan keberlanjutan bahasa daerah merupakan suatu kewajiban yang telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 32 tentang penghormatan dan pemeliharaan bahasa derah di Nusantara oleh negara. Sejalan dengan itu, undang-undang kebahasaan Nomor 24 Tahun 2009 juga menegaskan tentang keberadaan bahasa daerah yang berdampingan dalam

penggunaan bahasa Indonesia secara resmi. Landasan konstitusional tentang kebahasaan tersebut sinergis terhadap slogan "Trigatra Bangun Bahasa" oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek, yaitu "Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing". Berkenaan dengan kondisi yang demikian, pemerintah pusat dan daerah telah melakukan serangkaian upaya dalam pemertahanan dan pengembangan bahasa daerah.

Pemerintah Provinsi Bali sebagai salah satu pemerintah daerah yang memiliki perhatian serius terhadap keberlangsungan bahasa Bali senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Bali sejalan dengan arah kebijakan dari pemerintah pusat. Hal ini terefleksi melalui sejumlah kebijakan pemerintah daerah di Bali, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam hal ini, perhatian tersebut teraktualisasi melalui Peraturan Gubernur Bali No. 20 Tahun 2013 tentang *Bahasa, Aksara dan Sastra Daerah Bali Pada Pendidikan Dasar dan Menengah* terkait pembelajaran bahasa Bali secara formal. Peraturan tersebut diperkuat dengan Peraturan Gubernur No. 80 Tahun 2018 tentang *Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali* terkait pembelajaran dan pengembangan bahasa Bali secara informal. Kedua peraturan tersebut menjadi suatu referensi bagi pemerintah kabupaten/kota dalam merumuskan kebijakan tentang peningkatan kualitas pembelajaran bahasa Bali.

Suatu kebijakan strategis dalam peningkatan kualitas pembelajaran bahasa Bali teridentifikasi pada kebijakan pengangkatan guru kontrak kabupaten/kota yang diawali oleh kebijakan pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Denpasar (Wisnu dkk., 2021). Dalam hal ini, Disdikpora Kota Denpasar telah melaksanakan pengangkatan guru kontrak bahasa Bali pada jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Kebijakan tersebut dimulai pada tahun 2017 dan berlanjut setiap tahun hingga saat ini. Sampai dengan tahun 2021, guru kontrak bahasa Bali berjumlah 141 orang yang tersebar di SD Kecamatan Denpasar Utara (38 orang), SD di Kecamatan Denpasar Timur (26 orang), SD di Kecamatan Denpasar Barat (35 orang), SD di Kecamatan Denpasar Selatan (32 orang), dan SMP di seluruh Kota Denpasar (10 orang) (Wisnu dkk., 2022)

Persebaran tersebut mengindikasikan suatu keterserapan lulusan pendidikan bahasa Bali pada sekolah yang bernaung di bawah kewenangan Disdikpora Kota Denpasar. Keterserapan tersebut baru mencapai 85% dari keseluruhan jumlah guru bahasa Bali yang diperlukan (pada jenjang SD dan SMP Negeri) di wilayah kepemerintahan Kota Denpasar. Pencapaian tersebut memproyeksikan suatu keberlanjutan dari pengangkatan guru kontrak bahasa Bali oleh Disdikpora Kota Denpasar seperti terealisasi pada tahun 2021 dan 2022. Hal ini diperkuat oleh penambahan sekolah negeri tingkat SMP, penambahan kuota guru sejalan dengan perubahan status guru kontrak sebelumnya menjadi guru kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), penambahan rombel (kelas) di tingkat SD, dan sejumlah guru bahasa Bali tingkat SD dan SMP yang memasuki masa purna tugas (Pensiun). Kondisi yang demikian merefleksikan suatu harapan tentang keberlanjutan dalam keterserapan lulusan pendidikan bahasa Bali.

Upaya dari Pemerintah Kota Denpasar tersebut telah memberikan suatu inspirasi dan motivasi bagi pemerintah kabupaten lain di Bali untuk melakukan hal serupa dalam peningkatan kualitas pembelajaran bahasa Bali di daerah masing-masing, seperti upaya dari Pemerintah Kabupaten Badung dan Kabupaten Klungkung. Sebagai suatu kabupaten yang memiliki APBD tertinggi dan dekat dengan Kota Denpasar, Pemerintah Kabupaten Badung turut melaksanakan hal serupa secara berkelanjutan.

Demikian pula dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung yang memiliki perhatian yang serius terhadap upaya pelestarian bahasa Bali. Di samping itu, nuansa persaingan sekolah di kabupaten tersebut cenderung terkategori siginifikan karena telah terjadi dari jenjang pendidikan anak usia dini (Pasanea dkk., 2022). Hal ini terekspresi pada pendirian Pusat Kebudayaan oleh Pemerintah Provinsi Bali di kawasan hilir DAS Unda, di Desa Gunaksa. Upaya dari kedua kabupaten tersebut memperluas peluang keterserapan dalam pemberdayaan lulusan pendidikan bahasa Bali. Keterserapan ini kian meluas ketika kabupaten lain turut melakukan hal yang serupa.

Upaya Pemerintah Kota Denpasar serta kabupaten lain, seperti Badung dan Klungkung, telah berperan secara signifikan dalam penyerapan lulusan pendidikan bahasa Bali. Walaupun demikian, upaya tersebut terbatas pada tingkat SD dan SMP. Sementara itu, pemberdayaan guru pada tingkat SMA/SMK tidak dapat dijangkau karena berada dalam kewenangan Pemerintah Provinsi (Bali). Terkait dengan itu, Pemerintah Provinsi Bali melalui Disdikpora Provinsi Bali juga telah melakukan hal serupa berupa pengangkatan guru kontrak bahasa Bali di SMA/SMK yang tersebar di Pemerintahan Provinsi Bali. Berdasarkan informasi singkat dari operator DAPODIK ketika pelaksanaan observasi awal di kantor Disdikpora Provinsi Bali, pengangkatan guru kontrak jenjang SMA/SMK mulai dilaksanakan pada tahun 2016, yang meliputi guru mata pelajaran matematika, kimia, biologi, hingga pada guru bahasa Bali. Pengangkatan tersebut berkelanjutan hingga tahun 2022 sebagai suatu pelimpahan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Provinsi Bali.

Penelitian ini diarahkan pada suatu kajian terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dalam pemberdayaan guru bahasa Bali berkenaan dengan pengangkatan guru kontrak bahasa Bali pada jenjang SMA dan SMK. Sejalan dengan itu, permasalahan yang dikaji meliputi implementasi dan implikasi dari kebijakan pengangkatan guru kontrak tersebut. Kajian ini berorientasi pada pemerolehan data serta pemahaman yang komparatif dan komprehensif tentang implementasi kebijakan pemerintah daerah di Bali berkenaan dengan pemberdayaan guru bahasa Bali melalui pengangkatan guru kontrak pemerintah daerah. Di samping itu, kajian tersebut sekaligus sebagai perluasan serta pengembangan terhadap kajian serupa tahun sebelumnya tentang "Implementasi dan Implikasi Kebijakan Pemerintah Kota Denpasar dalam Pemberdayaan Guru Bahasa Bali" (2021). Dalam hal ini, kajian pada ranah kebijakan Pemerintah Provinsi Bali merupakan representasi dari esensi pemberdayaan lulusan pendidikan bahasa Bali di daerah Bali terkait kedudukan dan peranan pemerintah daerah Bali dalam pemertahanan bahasa Bali seperti teraktualisasi melalui pendidikan formal. Kajian tentang kebjikan seperti yang dilakukan melalui penelitian ini belum banyak terkonstruksi dalam penelitian kependidikan di Bali yang cenderung pada ranah pedagogik. Dengan demikian, penelitian terhadap pemberdayaan guru bahasa Bali jenjang SMA/SMK dapat menjadi suatu eksplorasi dan elaborasi terhadap kebijakan pemerintah daerah di Bali tentang peningkatan kualitas pembelajaran (bahasa Bali) secara konstruktif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merujuk pada suatu prosedur keilmuan dalam pemetaan, pemerolehan, pengkajian, serta penyajian data penelitian sebagai suatu metode penelitian. Prosedur ini berkenaan dengan serangkaian langkah yang konstruktif dalam penelitian. Dalam hal ini, konstruktivitas metode penelitian, meliputi: (1) rancangan penelitian, (2) jenis data penelitian, (3) metode pengumpulan data, serta (4) metode analisis data penelitian (Arikunto, 2010).

(1) Penelitian ini merupakan suatu tipologi penelitian kualitatif yang dirancang dalam formulasi sebagai penelitian kebijakan. Dalam hal ini, orientasi penelitian tertuju pada evaluasi kebijakan yang sedang berlaku untuk menghasilkan kebijakan yang efektif dan efisien di masa berikutnya (Sugiyoni, 2019). Sejalan dengan itu, orientasi penelitian tertuju pada suatu deskripsi tentang implementasi dan implikasi kebijakan Pemerintah Provinsi Bali terkait pemberdayaan guru bahasa Bali.

(2) Data penelitian secara umum berupa data primer dan sekunder. Dalam konteks ini, data primer dimaksudkan sebagai konstruksi ideologis dari kebijakan Pemerintah Provinsi Bali terkait permberdayaan guru bahasa Bali. Sementara itu, data sekunder dimaksudkan sebagai aktualisasi empiris dari kebijakan Pemerintah Provinsi Bali terkait permberdayaan guru bahasa Bali tersebut.

(3) Data penelitian dikumpulkan melalui studi dokumentasi, wawancara, dan angket secara terpadu. Dalam hal ini, pengumpulan data melalui studi dokumentasi berkenaan dengan unggahan peraturan pemerintah daerah tentang perekrutan guru serta SK pengangkatan kontrak bahasa Bali pada jenjang SMA dan SMK di wilayah Bali. Sementara itu, pengumpulan data melalui wawancara berkenaan dengan pemahaman latar belakang, pelaksanaan, serta keberlanjutan dari kebijakan tersebut kepada aparatur pemerintah sebagai penyelengara. Sejalan dengan itu, pengumpulan data melalui angket berkenaan dengan suatu konfirmasi dan komparasi tentang pelaksanaan kebijakan tersebut terhadap para guru kontrak sebagai peserta.

(4) Data penelitian dianalisis melalui serangkaian tahapan, yang meliputi: reduksi, klasifikasi, dan interpretasi. Dalam kaitan ini, reduksi data berkenaan dengan selektivitas data tentang kebijakan Pemerintah Provinsi Bali. Hal ini teraktualisasi melalui pemilihan sejumlah dokumen yang terkait dengan kebijakan pengangkatan guru bahasa Bali, penjelasan tentang pemahaman latar belakang, pelaksanaan, serta keberlanjutan kebijakan tersebut oleh Kepala Bidang Kepegawaian Disdikpora Provinsi Bali, serta konfirmasi tentang penerimaan dan pemetaan guru bahasa Bali jenjang SMA/SMK oleh guru bahasa Bali non-PNS di wilayah Disdikpora Provinsi Bali. Sementara itu, klasifikasi data berkenaan dengan konstruktivitas data dalam kategori sebagai implementasi dan implikasi dari kebijakan pemerintah provinsi Bali tersebut sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Sejalan dengan itu, interpretasi data berkenaan dengan kognitivitas data secara korelatif, komparatif, kompilatif, serta komprehensif terhadap data yang telah terklasifikasi tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian tentang pemberdayaan guru bahasa Bali jenjang SMA/SMK dalam kebijakan pemerintah Provinsi Bali berkenaan dengan suatu refleksi pada (1) implementasi dan (2) implikasi dari kebijakan tersebut. Dalam hal ini, implementasi pemberdayaan guru bahasa Bali jenjang SMA/SMK dalam kebijakan pemerintah Provinsi Bali, meliputi: pelimpahan, penataan, dan pemetaan guru bahasa Bali berdasarkan kebijakan tersebut. Sementara itu, implikasi pemberdayaan guru bahasa Bali jenjang SMA/SMK dalam kebijakan pemerintah Provinsi Bali, meliputi: perimbangan, penguatan, dan pengembangan guru bahasa Bali seiring kebijakan tersebut. Substansi dari kedua dimensi utama pada penyajian hasil penelitian ini, yaitu tentang implementasi dan implikasi tersebut, beserta sejumlah aspek yang terkorelasi dan terintegrasi secara konstruktif selanjutnya terdeskripsi melalui serangkaian pembahasan sebagai berikut.

1. Implementasi Pemberdayaan Guru Bahasa Bali jenjang SMA/SMK dalam Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali

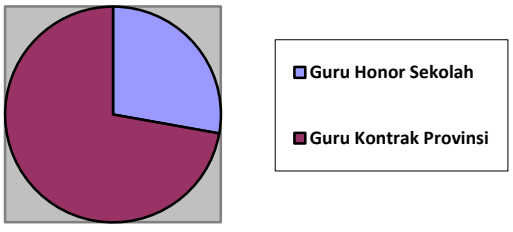
Pelimpahan Guru Kontrak Bahasa Bali dari Kabupaten/Kota ke Provinsi Bali. Kewenangan dalam pengelolaan satuan pendidikan pada ranah pemerintah daerah di Bali mengalami perubahan secara struktural dan sektoral sejak tahun 2017. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Bali memperoleh kewenangan mengelola satuan pendidikan, khususnya sekolah pada jenjang SMA/SMK. Kondisi yang demikian telah meringankan beban dan sekaligus menguatkan peluang kabupaten/kota dalam peningkatan serta pengembangan substansi utama penunjang kualitas pendidikan, yaitu ketersediaan guru yang berkompetensi secara proporsional serta sarana dan prasarana kependidikan yang berakomodasi secara teritorialitas komunal. Fenomena ini terekspresi melalui kebijakan Kota Denpasar dalam pengangkatan guru kontrak bahasa Bali pada jenjang SD dan SMP beserta penambahan jumlah sekolah (SMP) terjadi sejak tahun 2017 (Wisnu dkk., 2021). Kebijakan tersebut sekaligus sebagai suatu atensi terhadap sejumlah fenomena tentang marginalisasi pendidikan di Kota Denpasar (Suciani, 2003). Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bali turut berperan secara empirik dalam pemberdayaan guru bahasa Bali melalui pengelolaan guru kontrak jenjang SMA/SMK yang dilimpahkan oleh Disdikpora dari pemerintah kabupaten/kota di Bali. Peranan tersebut secara umum bersentuhan terhadap peningkatan kuantitas dan kualitas guru bahasa Bali seperti terefleksi melalui data tentang jumlah guru yang menjadi tenaga Honor Sekolah dan Honor Daerah TK I Provinsi per tanggal 27 September 2022.

Tabel 1. Status Kepegawaian Guru Bahasa Bali di SMA/SMK se-Provinsi Bali

No.	*Status Pegawai*	*Jumlah*
1.	Guru Honor Sekolah	42
2.	Honor Daerah Provinsi Bali	109

Sumber: *realtime* info GTK Disdikpora Provinsi Bali, 27 September 2022

Tabel 1 tersebut menyajikan status kepegawaian guru bahasa Bali di jenjang SMA/SMK se-Provinsi Bali per tanggal 27 September 2022 dengan status Honorer Sekolah berjumlah 42 orang. Sementara itu, guru bahasa Bali dengan status Honor Daerah (Kontrak) Provinsi Bali berjumlah 109 orang. Presentase data jumlah guru berkenaan dengan status kepegawaian tersebut sebagai berikut.



Gambar. 1. Diagram Perbandingan Jumlah Guru Honor Sekolah dan Guru Kontrak Provinsi Bali

Dari gambar 1 tersebut, jumlah guru yang berstatus Honorer Sekolah sebesar 27.81%. Sementara itu, jumlah guru yang berstatus Honor Daerah Provinsi Bali sebesar 72.19%. Data tersebut memperjelas peranan Pemerintah Provinsi Bali dalam menunjang pemberdayaan guru bahasa Bali melalui kewenangan pengelolaan guru SMA/SMK

yang dilimpahkan oleh kabupaten/kota di Bali. Peranan yang demikian sejalan dengan marwah dari desentralisasi pendidikan seiring aktualisasi undang-undang otonomi daerah menuju pengembangan suatu wilayah kependidikan pada ranah kadaerahan yang lebih kondusif dan demokratif (Chan & Sam, 2013).

Penataan Guru Kontrak Bahasa Bali dari Kabupaten/Kota ke Provinsi Bali. Pelimpahan guru kontrak bahasa Bali dari pemerintah kabupaten/kota ke Pemerintah Provinsi Bali berkorelasi pada suatu upaya penataan terhadap komposisi dan distribusi guru bahasa Bali pada jenjang SMA/SMK. Dalam hal ini, penataan tersebut merupakan suatu penyesuaian jumlah guru bahasa Bali pada seluruh SMA/SMK di Provinsi Bali. Upaya ini terkait dengan data tentang keberadaan guru bahasa Bali pada jenjang pendidikan tersebut yang cenderung menunjukkan kekurangan guru bahasa Bali. Sementara ini, kekurangan tersebut ditanggulangi oleh masing-masing satuan pendidikan melalui pengangkatan guru honor sekolah dengan pemanfaatan Dana BOS serta penugasan tambahan terhadap guru dari bidang studi lain yang memiliki kedekatan secara substansial, seperti guru agama Hindu dan guru Seni Budaya. Dalam kondisi yang demikian, kualitas pembelajaran bahasa Bali pada jenjang SMA/SMK kurang tercapai secara optimal. Selanjutnya, upaya penataan terhadap jumlah guru bahasa Bali oleh Pemerintah Provinsi Bali merupakan suatu langkah strategis menuju pencapaian kualitas pembelajaran bahasa Bali yang standar sejalan dengan keterbatasan penganggaran dari pemerintah kabupaten/kota. Upaya ini merupakan suatu implementasi dari kebijakan tentang kualitas dan kuantitas guru menuju profesionalitas guru yang berkelanjutan (Chan & Sam, 2013).

Pemetaan Guru Kontrak Bahasa Bali dari Kabupaten/Kota ke Provinsi Bali. Penataan guru kontrak bahasa Bali oleh Pemerintah Provinsi Bali terproyeksi pada pemetaan terhadap kompetensi dan kualifikasi guru bahasa Bali pada jenjang SMA/SMK. Dalam hal ini, kompetensi yang dimaksudkan merujuk pada keilmuan guru bahasa Bali sebagai lulusan ilmu pendidikan bahasa Bali. Sementara itu, kualifikasi yang dimaksudkan merujuk pada status guru tersebut, yaitu sebagai guru PNS dan sebagai guru kontrak, baik daerah maupun sekolah. Berkenaan dengan itu, pemetaan guru kontrak bahasa Bali jenjang SMA/SMK berorientasi pada pendataan tentang ketersediaan guru bahasa Bali yang kompeten beserta status yang dimiliki oleh keseluruhan guru tersebut hingga saat ini. Melalui pendataan tersebut dapat diketahui, bahwa ketersediaan guru bahasa Bali untuk jenjang SMA/SMK di Provinsi Bali belum terpenuhi secara proporsional dan profesional. Hal ini merujuk pada sejumlah guru berstatus PNS yang akan memasuki purnatugas, jumlah guru kontrak sekolah yang relatif besar, serta sejumlah guru bidang studi lain yang ditugaskan untuk mengajar bahasa Bali. Pemetaan terhadap guru kontrak bahasa Bali tersebut pada akhirnya diarahkan untuk merancang formasi penerimaan guru bahasa Bali jenjang SMA/SMK dengan status PNS dan PPPK serta penambahan kuota guru kontrak daerah guna mengurangi beban sekolah dalam penggunaan Dana BOS satuan pendidikan untuk pembiayaan honor guru kontrak sekolah. Rancangan ini sejalan dengan pengangkatan guru kontrak daerah di kabupaten/kota seperti dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar dari kurun waktu tahun 2017 (Wisnu dkk., 2021). Upaya yang demikian sinergis terhadap pengembangan kebijakan pendidikan di era globalisasi melalui peningkatan kualitas tenaga pendidik di Indonesia (Chan & Sam, 2013). Terlebih lagi ketika saat ini pemerintah sedang menuju pada pengembangan keprofesian guru yang berkelanjutan (Kastawi & Yuliejantiningsih, 2019)

2. Implikasi Pemberdayaan Guru Bahasa Bali jenjang SMA/SMK dalam Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali

Perimbangan Otoritas Guru Bahasa Bali pada jenjang SMA/SMK di Provinsi Bali. Upaya pemberdayaan guru bahasa Bali jenjang SMA/SMK seiring kebijakan Pemerintah Provinsi Bali berimplikasi pada suatu perimbangan otoritas dalam pengelolaan guru bahasa Bali di wilayah pemerintah daerah Bali. Dalam hal ini, perimbangan tersebut dimaksudkan sebagai suatu pemerataan tanggung jawab pada pengelolaan guru secara terstruktur antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali. Kondisi yang demikian telah dirasakan dapat meringankan beban finansial dari pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola keseluruhan komponen yang terintegrasi dalam satuan pendidikan secara berkala dan berkelanjutan. Hal ini teridentifikasi melalui kebijakan pengangkatan guru kontrak daerah serta penambahan jumlah sekolah oleh pihak Pemerintah Kota Denpasar (Wisnu dkk., 2021). Lahirnya Kebijakan tersebut merupakan suatu kesinambungan dari kebujakan serupa di tingkat provinsi yang telah menginisiasi suatu restrukturisasi dalam pengelolaan pendidikan. Demikian juga pada pemerintahan provinsi yang kian fokus terhadap penyelenggaraan pendidikan secara konstruktif dan produktif. Hal ini telah terekspresi melalui pengelolaan terhadap pelimpahan guru kontrak dari kabupaten/kota serta penambahan sekolah pada jenjang SMA/SMK di wilayah Provinsi Bali. Upaya tersebut sinergis terhadap implementasi praktik merdeka belajar pada satuan pendidikan di Provinsi Bali (Kartika, 2021).

Penguatan Profesionalitas Guru Bahasa Bali pada jenjang SMA/SMK di Bali. Upaya pemberdayaan guru bahasa Bali jenjang SMA/SMK seiring kebijakan Pemerintah Provinsi Bali turut berimplikasi pada suatu penguatan profesionalitas guru bahasa Bali di kewilayahan Provinsi Bali. Dalam hal ini, penguatan tersebut dimaksudkan sebagai suatu peningkatan kualitas guru bahasa Bali sesuai kompetensi dan sertifikasi secara akademik. Kondisi yang demikian berkaitan dengan peran partisipatif dari pemerintah provinsi dalam penataan komposisi guru bahasa Bali secara terstruktur melalui jenjang SMA/SMK. Peranan tersebut telah teraktualisasi melalui pendataan distribusi dan kualifikasi guru bahasa Bali pada jenjang pendidikan tersebut. Hal ini telah terimplementasi melalui percepatan kesempatan dalam Pendidikan profesi Guru (PPG) serta pembentukan satuan pendidikan baru pada jenjang SMA/SMK. Upaya ini sejalan dengan program pemerintah pusat dalam pengembangan keprofesian guru secara berkelanjutan (Kastawi dkk., 2017). Fenomena yang demikian sinergis terhadap peningkatan kualitas atau mutu guru sebagai salah satu faktor yang sangat penting dalam dunia pendidikan (Neolaka, 2019).

Pengembangan Kuantitas Guru Bahasa Bali pada jenjang SMA/SMK di Provinsi Bali. Upaya pemberdayaan guru bahasa Bali jenjang SMA/SMK seiring kebijakan Pemerintah Provinsi Bali juga berimplikasi pada pengembangan kuantitas guru bahasa Bali di kewilayahan Provinsi Bali. Dalam hal ini, pengembangan tersebut dimaksudkan sebagai suatu penambahan jumlah guru bahasa Bali pada jenjang SMA/SMK di Provinsi Bali. Upaya tersebut telah dilakukan melalui pengangkatan guru bahasa Bali dengan status guru PNS dari tahun 2018 hingga tahun 2021. Hal ini sejalan dengan penambahan jumlah sekolah pada jenjang SMA/SMK sebagai aktualisasi dari peran partisipatif Provinsi Bali. Upaya lain yang sedang dilakukan adalah pengusulan pengangkatan guru bahasa Bali dengan status PPPK karena selama ini, formasi PPPK terhadap guru bahasa Bali diintegrasikan ke dalam formasi PPPK guru Seni Budaya. Dengan status PPPK tersebut, guru bahasa Bali yang saat ini masih berstatus kontrak sekolah secara perlahan dapat ditiadakan, sehingga

dapat meringankan penggunaan dana BOS. Seiring dengan itu, pemerintah provinsi Bali juga berencana melakukan penambahan guru bahasa Bali dengan status kontrak daerah (provinsi) seperti dilakukan oleh pemerintah Kota Denpasar serta beberapa kabupaten lain. Serangkaian upaya dari Pemerintah Provinsi Bali melalui Disdikpora Provinsi Bali tersebut sinergis terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dalam upaya revitalisasi bahasa, aksara, dan sastra Bali (Sugiartha, 2023). Sinergisitas kebijakan dalam pendidikan yang demikian merupakan suatu potensi yang signifikan dalam mengatasi problematika utama pada pendidikan formal, yaitu pencapaian pemerataan terhadap kuantitas dan kualitas pendidikan (Widja, 2012).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Deskripsi tentang keberadaan guru kontrak bahasa Bali pada jenjang SMA/SMK berkenaan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dapat disimpulkan seperti berikut. (1) Implementasi pemberdayaan guru bahasa Bali jenjang SMA/SMK dalam kebijakan pemerintah Provinsi Bali, meliputi: pelimpahan, penataan, dan pemetaan guru bahasa Bali di Provinsi Bali. Dalam hal ini, pelimpahan berkenaan dengan pengambilalihan kewenangan pada pengelolaan guru bahasa Bali jenjang SMK/SMK oleh Provinsi Bali. Sementara itu, penataan berkenaan dengan penyesuaian jumlah guru bahasa Bali pada jenjang SMA/SMK di wilayah Provinsi Bali. Sejalan dengan itu, pemetaan berkenaan dengan perencanaan yang terpadu terhadap komposisi guru bahasa Bali pada jenjang SMA/SMK di wilayah Provinsi Bali. Selanjutnya, (2) implikasi pemberdayaan guru bahasa Bali jenjang SMA/SMK dalam kebijakan pemerintah Provinsi Bali, meliputi: perimbangan, penguatan, dan pengembangan. guru bahasa Bali seiring. Dalam hal ini, perimbangan dimaksudkan sebagai suatu pembagian tanggung jawab antara pemerintah daerah di Bali dalam pengelolaan pendidikan. Sementara itu, penguatan dimaksudkan sebagai suatu peningkatan kualitas guru bahasa Bali sesuai kompetensi dan sertifikasi akademik. Sejalan dengan itu, pengembangan dimaksudkan sebagai suatu penambahan jumlah guru bahasa Bali pada jenjang SMA/SMK di Provinsi Bali. Dengan demikian, kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dalam pengembangan dunia pendidikan formal, termasuk pada pemberdayaan guru bahasa Bali, telah terimplementasi secara konstruktif serta terkorelasi secara kontributif terhadap peningkatan kualitas pendidikan di wilayah Provinsi Bali seperti telah dirasakan pada peningkatan kualitas guru bahasa Bali.

Saran

Pembahasan tentang hasil serta temuan penelitian ini selanjutnya dapat menyajikan sejumlah rekomendasi sebagai suatu saran, baik secara teoretis maupun praktis sebagai berikut. Secara teoretis, pengkajian terhadap kebijakan pendidikan, khususnya pada pemerintah daerah, merupakan sesuatu yang menarik dan penting dilakukan sebagai suatu evaluasi dan proyeksi tentang pengembangan aspek-aspek signifikan dalam ranah kependidikan. Berkenaan dengan itu, secara praktis, hasil-hasil kajian tentang kebijakan pendidikan dapat menjadi suatu acuan untuk memperjuangkan sejumlah kepentingan dalam kependidikan seperti perjuangan terhadap formasi PPPK untuk guru bahasa Bali yang saat ini sedang diperjuangkan oleh Pemerintah Provinsi Bali di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.

Chan, S. M., & Sam, T. T. (2013). *Analisis SWOT: Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*. PT. RajaGrafindo Persada.

Kartika, I. M. (2021). *Praktik Merdeka Belajar Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Denpasar*. Universitas Udayana.

Kastawi, N. S., & Yuliejantiningsih, Y. (2019). Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, *6*(2), 157–168. https://doi.org/10.24246/j.jk.2019.v6.i2.p157-168

Kastawi, N. S., Yuliejantiningsih, Y., & Sunandar, S. (2017). Efektivitas Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Untuk Guru. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, *4*(1), 28. https://doi.org/10.24246/j.jk.2017.v4.i1.p28-36

Neolaka, A. (2019). *Isu-isu Kritis Pendidikan; Utama dan Tetap Penting Namun Terabaikan*. PRANADAMEDIA GROUP.

Pasanea, M. R. H., Iriani, A., & Wasitohadi, W. (2022). Evaluasi Strategi Bersaing di TK Tunas Kasih Klungkung. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, *9*(1), 88–98. https://doi.org/10.24246/j.jk.2022.v9.i1.p88-98

Suciani, N. M. (2003). *Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Termarjinalkan di Kota Denpasar*. 1–6. https://ojs.unud.ac.id/index.php/ecs/article/view/9734

Sugiartha, I. G. A. (2023). *Kebujakan Pemerintah Provinsi Bali Dalam Revitalisasi Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali*.

Sugiyoni. (2019). *Metode Penelitian Kebijakan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D, dan Penelitian Evaluasi)*. Penerbit Alfabeta.

Widja, I. G. (2012). *Pendidikan Sebagai Ideologi Budaya*. Penerbit Program Magister (S2) dan Doktor (S3) Kajian Budaya Universitas Udayana bekerjasama dengan Penerbit Krishna Abadi.

Wisnu, I. W. G., Purnami, I. A. P., & Sari, N. P. D. (2021). *Implementasi Dan Implikasi Kebijakan Pemerintah Kota Denpasar Dalam Pemberdayaan Guru Bahasa Bali*.

Wisnu, I. W. G., Purnami, I. A. P., & Sari, N. P. D. (2022). Peranan Pemerintah Kota Denpasar Dalam Pemberdayaan Guru Bahasa Daerah. *Jurnal Bahana Manajemen …*, *11*, 137–142. http://ejournal.unp.ac.id/index.php/bahana/article/view/118083